

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Teori rekognisi Honneth menempati posisi penting dalam perkembangan sosiologi kritis sebagai representasi generasi ketiga. Melalui kritik imanen terhadap generasi sebelumnya, Honneth menggeser fokus teori kritis dari rasio instrumental dan komunikasi menuju paradigma pengakuan. Pergeseran ini memulihkan hubungan antara teori dan praksis dengan menempatkan pengalaman moral subjek sebagai dasar analisis sosial. Dalam kerangka ini, ketidakadilan tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan ekonomi atau komunikasi, melainkan sebagai kegagalan pengakuan terhadap martabat manusia. Paradigma pengakuan menjadikan perjuangan sosial sebagai medan emansipasi moral, di mana subjek memperoleh kebebasan melalui relasi timbal balik yang menghargai eksistensinya.

Sumbangan utama teori rekognisi terhadap sosiologi kritis terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan normatif dalam satu kerangka emansipasi. Melalui tiga ranah pengakuan, Honneth menunjukkan bahwa kebebasan dan integritas personal hanya dapat terwujud melalui hubungan saling menghormati antar subjek. Teori ini menawarkan dasar normatif baru bagi keadilan sosial, dengan memandang konflik dan perjuangan sosial sebagai dorongan moral menuju kehidupan etis (*Sittlichkeit*) yang menjamin martabat manusia. Dengan demikian, teori rekognisi memperluas horizon sosiologi kritis, menjadikannya lebih peka terhadap pengalaman konkret ketidakadilan dalam masyarakat modern dan relevan bagi pembacaan konteks sosial Indonesia kontemporer.

Dari sisi metodologis, kelebihan penelitian ini ada dalam penelusuran transformasi gagasan Honneth. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada kurangnya eksplorasi empiris dan belum optimalnya integrasi antara pendekatan filosofis dan analisis ekonomi-politik. Kesadaran atas keterbatasan tersebut justru

memperkuat nilai reflektif kajian ini sebagai pijakan awal bagi pengembangan teori rekognisi yang lebih kontekstual dan interdisipliner. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan validitas gagasan Honneth, tetapi juga mengajak refleksi atas relevansi dan keterbatasan teori rekognisi dalam memahami keadilan modern.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang penting, yakni membuka peluang pengembangan sintesis antara teori rekognisi Honneth dan pendekatan lain seperti redistribusi, *social suffering*, atau politik rekognisi, guna menjelaskan secara simultan dimensi moral dan struktural ketidakadilan sosial. Untuk menjawab tantangan empiris di Indonesia, di mana penderitaan sosial lahir tidak hanya dari ketiadaan pengakuan, tetapi juga dari ketimpangan ekonomi dan eksklusi sistemik, penelitian lanjutan disarankan memadukan analisis filsafat sosial dengan pendekatan empiris seperti fenomenologi, etnografi, atau analisis wacana. Pendekatan lintas budaya yang menautkan teori rekognisi dengan nilai-nilai sosial Indonesia juga penting untuk memperluas relevansi dan kedalaman reflektif teori ini.

Implikasi penelitian ini juga signifikan bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Konsep rekognisi dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, otonomi moral, serta keadilan sosial dalam kehidupan akademik maupun profesional. Pengintegrasian teori rekognisi ke dalam kurikulum bukan hanya memperkuat basis reflektif mahasiswa terhadap nilai-nilai kemanusiaan, namun juga menumbuhkan budaya akademik yang menghargai perbedaan dan keterlibatan dialog antar subjek.

Implikasi sosialnya dapat diarahkan pada praksis kebijakan publik yang lebih berkeadilan dan inklusif. Konsep pengakuan dapat menjadi inspirasi normatif bagi perumusan kebijakan pendidikan inklusif, perlindungan minoritas, dan pemberdayaan kelompok rentan. Dengan demikian, teori rekognisi tidak berhenti sebagai wacana filosofis saja. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan dasar reflektif bahwa perjuangan untuk pengakuan adalah perjuangan moral sekaligus sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, teori rekognisi menawarkan arah etis bagi

pembangunan kebudayaan demokratis yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi utama kehidupan bersama.

